



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008- 2013 telah ditetapkan **Visi** Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni **"Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar"**, dan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan **misi** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat;
- b. Mengakselerasi Laju Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Masyarakat;
- c. Mewujudkan Keunggulan Lokal untuk Memicu Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah;
- d. Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Kehidupan yang Inovatif;
- e. Memperkuat Kelembagaan dalam Perwujudan Tatakelola yang Baik;

Untuk mengarahkan seluruh aktivitas pembangunan yang akan dilaksanakan sepanjang periode RPJMD tersebut, maka ditetapkan pula 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
2. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Perwujudan Keunggulan Lokal Untuk Memicu Laju Pertumbuhan Ekonomi;
4. Mewujudkan Sulawesi Selatan Sebagai Entitas Sosial Ekonomi Yang Berkeadilan;
5. Penciptaan Lingkungan Kondusif bagi Kehidupan Inovatif;
6. Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
7. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan.

Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut disusun dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, di sisi lain semakin terbuka pula peluang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di setiap daerah. Guna mengeliminir dampak perubahan yang terjadi maka pola perencanaan yang dianut saat ini adalah pola perencanaan strategis.

Dengan pola yang demikian ini, maka apa yang telah direncanakan sejak awal dapat didaptasikan pada setiap perubahan yang terjadi, namun orientasi program-program yang telah ditetapkan sebelumnya tetap pada aspek manfaat yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun Indikator utama dalam melihat sejauh mana keberhasilan pencapaian Visi Pembangunan Daerah adalah dengan melihat **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Dijadikannya IPM tersebut sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, karena melalui indikator tersebut akan tergambar sejauh mana kinerja pembangunan social maupun ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia secara nasional yang dipublikasi BPS Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2008 IPM daerah ini mencapai 70,22 dan secara nasional menempati peringkat 21, dan dalam kurun waktu lima tahun yakni pada 2012 indikator ini telah mengalami peningkatan hingga menjadi 72,70 dan secara nasional berada pada rangking 17.

Apabila pertumbuhan IPM daerah ini dilihat dari tahun ke tahun, maka pada tahun 2008 IPM Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 0,86 persen, menempati peringkat ke-14 dibanding provinsi lain di Indonesia, sementara pada tahun yang sama IPM nasional tumbuh sebesar 0,80 persen. Kemudian pada tahun 2009, saat IPM nasional tumbuh 0,82 persen IPM Sulawesi Selatan dapat tumbuh sebesar 1,03 persen dan pertumbuhan yang dicapai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Demikian pula pada tahun 2012 pertumbuhan IPM Sulsel mencapai 0.78 persen,

dimana pada tahun yang sama pertumbuhan IPM nasional hanya tumbuh sebesar 0,71 persen.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan prioritas-prioritas pembangunan tahunan. Sehubungan hal tersebut, dalam RKPD tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan tema pembangunan yakni **“Percepatan Pemenuhan Hak Dasar dan Perbaikan Distribusi Pendapatan”**, dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian;
3. Pengembangan Industri Pengolahan dan Pariwisata Unggulan;
4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup;
6. Pembinaan serta Pengembangan Koperasi dan UMKM.

Dalam upaya pencapaian sasaran prioritas-prioritas tersebut maka dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 telah ditetapkan 49 kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam 361 program pembangunan dan dilaksanakan melalui 4.033 kegiatan dengan alokasi anggaran dalam bentuk belanja pembangunan kurang lebih Rp. 5,64 triliun.

Walaupun demikian, dalam melaksanakan program/kegiatan dalam upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut, masih terdapat permasalahan yang sangat mendasar yakni masih adanya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan program yang telah disepakati dalam RPJMD, hal ini disebabkan karena Rencana Pembangunan Strategis (RENSTRA) SKPD yang menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan pada setiap SKPD belum seutuhnya bersinergi dengan RPJMD tahun 2008 - 2013. Dengan kondisi yang demikian maka apa yang dilakukan oleh sebahagian SKPD tidak terfokus pada upaya pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah dicapai tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya sinergitas dan penajaman sasaran pembangunan, utamanya dalam hal target-target kinerja apa di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena instansi inilah yang menjadi ujung tombak pencapaian target RPJMD maupun RKPD.

Upaya-upaya sinergitas tidak hanya perlu dilakukan dalam lingkup Pemerintah Provinsi, namun upaya tersebut perlu pula dilakukan dan lebih dipertegas antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten/kota yang ada di daerah ini.

Makassar, 2014

Gubernur Sulawesi Selatan

DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si., MH